

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PENYELEWENGAN KEUANGAN DAERAH PADA INSTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

DIKI OKTA DWI PUTRA

1310111089

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Hendria Fithrina, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN KEUANGAN DAERAH PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

DIKI OKTA DWI PUTRA, 1310111089 , Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), jumlah halaman 66, Tahun 2018

ABSTRAK

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkup Kabupaten Solok agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, untuk itu diperlukan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat Daerah sebagai salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dan fungsional dapat aktif dan responsiv dalam mencegah penyelewengan keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dilihat disini adalah meskipun telah terdapat badan atau lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan, tetapi masih terdapat pengelolaan keuangan daerah yang sering ditemukan berupa penyelewengan, pemborosan, dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Adanya temuan terhadap penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran di Nagari Guguk Sarai IX Koto Sungai Lasi pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitian sebagai berikut bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok belum optimal, ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan tiap tahunnya tidak bisa mencakup seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Solok. Kendala terhadap pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok yaitu anggaran yang dimiliki sangat terbatas hal ini menyebabkan kinerja Inspektorat belum optimal, dan sumber daya manusianya masih terbatas pada jumlah auditor kemudian adanya pengaruh-pengaruh atau tekanan terhadap Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan yang mana akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Solok diberikan anggaran yang cukup supaya dapat melakukan pemeriksaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Solok tiap tahunnya, dan memberikan kedudukan yang lebih tinggi agar Inspektorat dapat bekerja tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari Bupati.

Kata kunci : Pengawasan, Inspektorat, Keuangan Daerah